

The background of the page features a large, faint watermark of the Mahkamah Agung (Supreme Court of the Republic of Indonesia) logo. The logo is circular and contains the text 'MAHAKMAGU' at the top and 'AGUNG' at the bottom, with a central emblem featuring a Garuda and a shield.

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

**Januari s/d Maret
Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, telah disusunnya Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB periode Januari 2024 s/d Maret 2024. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB melaksanakan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik serta untuk memenuhi surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 tanggal 13 April 2016 dan Nomor 608/DJU/PS02/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi terhadap layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB.

Laporan hasil survei ini berisikan elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB. Laporan ini memberikan data dan informasi tentang tingkat Indeks Persepsi Anti Korupsi yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil.

Semoga hasil Survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan utama pada masing-masing Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB serta sebagai bahan evaluasi kinerja organisasi agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih efektif dan efisien.

Demikian Laporan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi pada

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB ini disusun dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 04 April 2024
Ketua Tim Survei

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widana Anggara Putra', written over a rectangular box.

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	2
D. Rencana Kerja	2

BAB II METODOLOGI

Metode Penelitian	4
1. Populasi dan Sampel	4
2. Lokasi Penelitian dan Unit Analisa	4
3. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	5
4. Teknik Analisa Data.....	5
5. Tahapan Pelaksanaan	6

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden.....	8
1. Tingkat Pendidikan Responden.....	8
2. Pekerjaan Responden	8
3. Domisili Responden	9
4. Kelompok Usia Responden	9
5. Layanan yang Digunakan	9
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	10
1. Indikator Manipulasi Peraturan.....	10
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	10
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	10
4. Indikator Transparansi Biaya.....	11
5. Indikator Biaya Tambahan.....	11
6. Indikator Hadiah, mendapat.....	11
7. Indikator Transparansi Pembayaran.....	11
8. Indikator Percaloan.....	12
9. Indikator Perbuatan Curang.....	12
10. Indikator Transaksi Rahasia.....	12
C. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	12

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan	16
Rekomendasi.....	16
Pengantar Kuisisioner IPK.....	18

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai

diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

D. Rencana Kerja

1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan Pelaksana
- b. Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- c. Penyiapan Bahan
- d. Kuesioner.
- e. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- f. Kelengkapan peralatan.
- g. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- h. Jumlah Responden.
- i. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- j. Penyusunan Jadwal
- k. Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

2. Pelaksanaan Pengolahan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh Responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya diolah untuk membuat laporan.

3. Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat Responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas Responden.

4. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam beberapa periode semester.

BAB II METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

1. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan datang ke kantor dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu dilingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Unit analisis

adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu antara Januari 2024 s/d Maret 2024. Selanjutnya data diolah untuk laporan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Pengawas (Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum). Pengawas akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan Responden, sekaligus memastikan apakah Responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. *Pertama*, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- b. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
- c. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

5. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1.

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2.

Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3.

Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

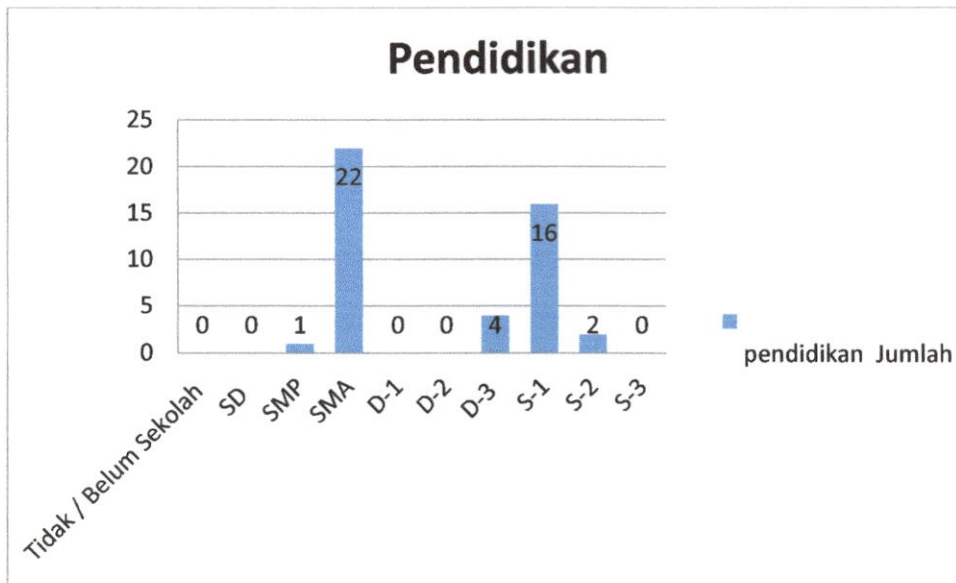
1. Tingkat pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan SMA yaitu 22 responden (50 %).

Tabel 4.
Tingkat pendidikan Responden

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	0
2	SD	0
3	SMP	1
4	SMA	22
5	D-1	0
6	D-2	0
7	D-3	4
6	S-1	16
7	S-2	2
8	S-3	0
Total		45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



2. Pekerjaan Responden

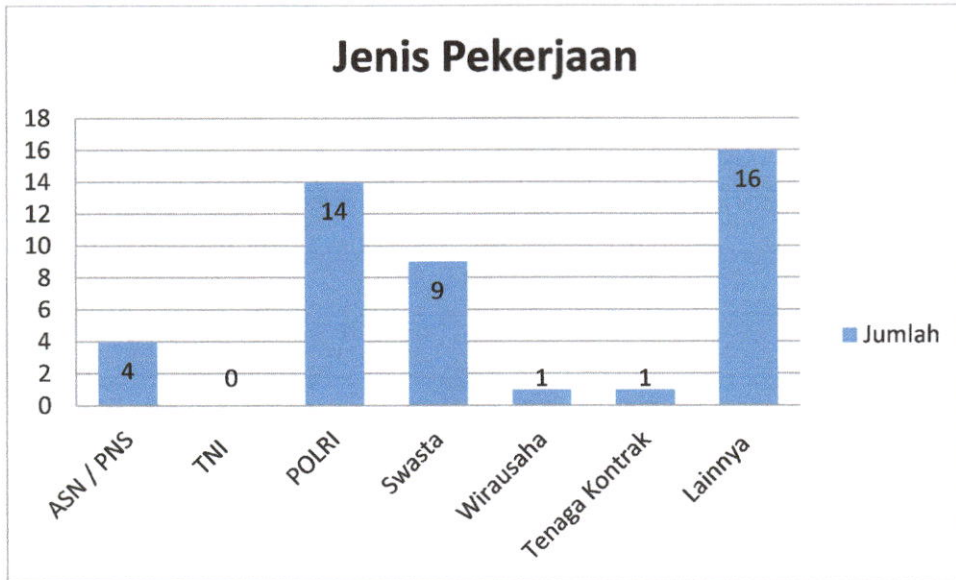
Dari sisi jenis pekerjaan Responden, menunjukkan bahwa diketahui sebanyak 13 Responden (38,23 %) pengguna layanan teridentifikasi berprofesi sebagai POLRI.

Tabel 5.

Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Jumlah
1	ASN / PNS	4
2	TNI	0
3	POLRI	14
4	Swasta	9
5	Wirausaha	1
6	Tenaga Kontrak	1
7	Lainnya	16
Total		45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3. Domisili Responden

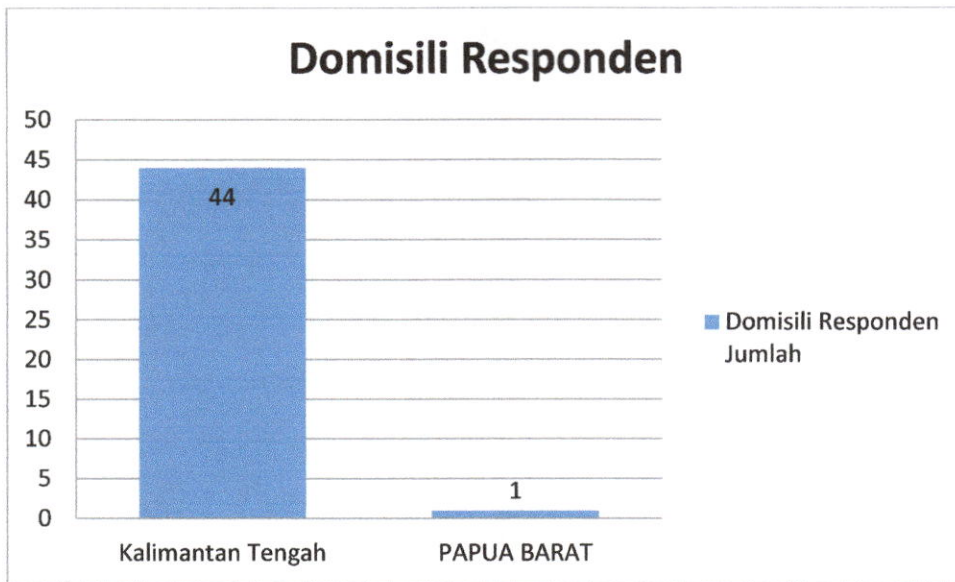
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, Responden paling banyak berasal dari Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 44 Responden (98 %).

Tabel 6.

Domisili Responden

NO	Domisili	JUMLAH
1	Kalimantan Tengah	44
2	Papua Barat	1
	Total	45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



4. Kelompok Usia Responden

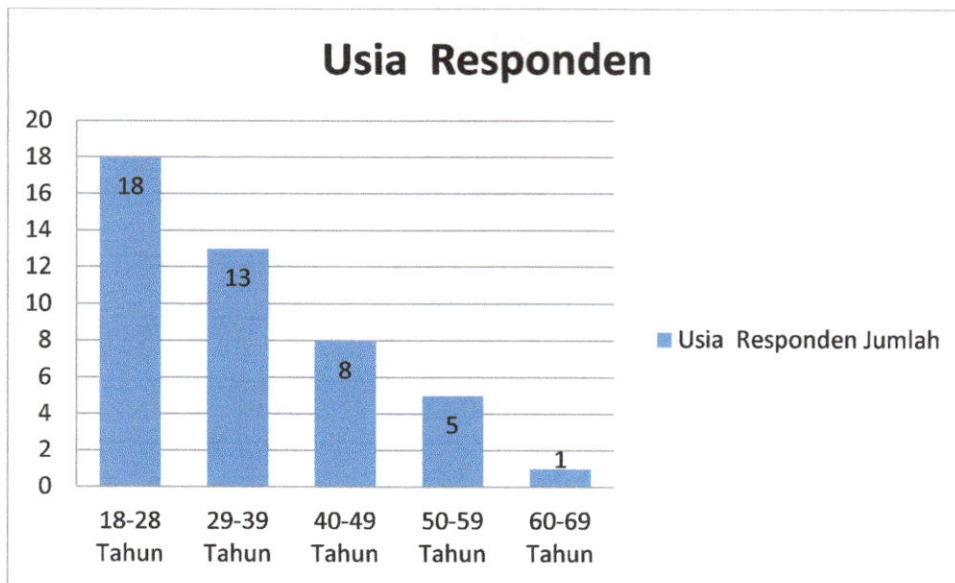
Sementara itu jika melihat Responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun sebanyak 18 Responden (40,00 %).

Tabel 7.

Usia Responden

NO	USIA	JUMLAH
1	18-28 Tahun	18
2	29-39 Tahun	13
3	40-49 Tahun	8
4	50-59 Tahun	5
5	60-69 Tahun	1
	Total	45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



5. Layanan yang digunakan

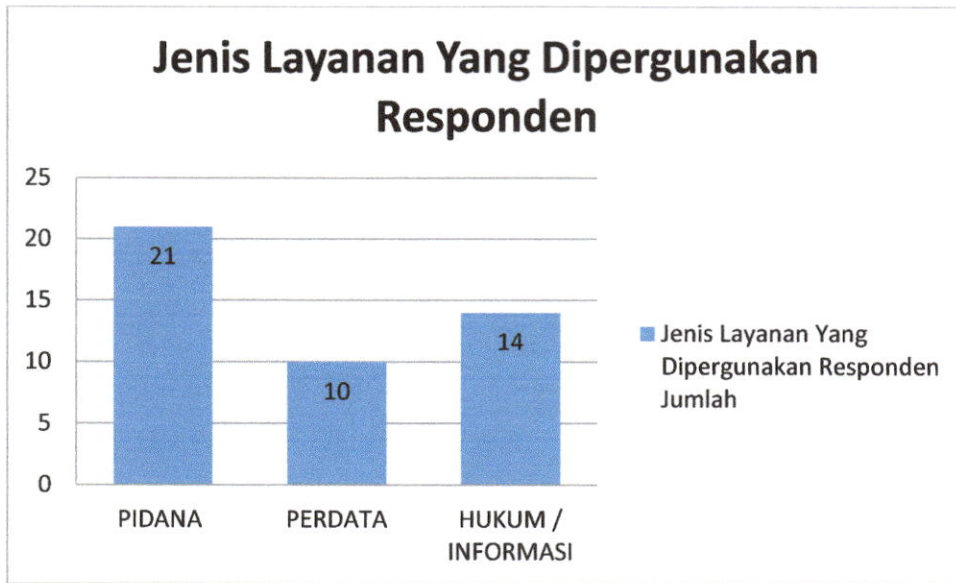
Layanan Perdata menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh Responden, yaitu sebanyak 18 Responden (40 %).

Tabel 8.

Jenis Layanan yang Dipergunakan Responden

NO	JENIS LAYANAN	JUMLAH
1	Perdata	21
2	Pidana	10
3	Hukum	14
	Total	45

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

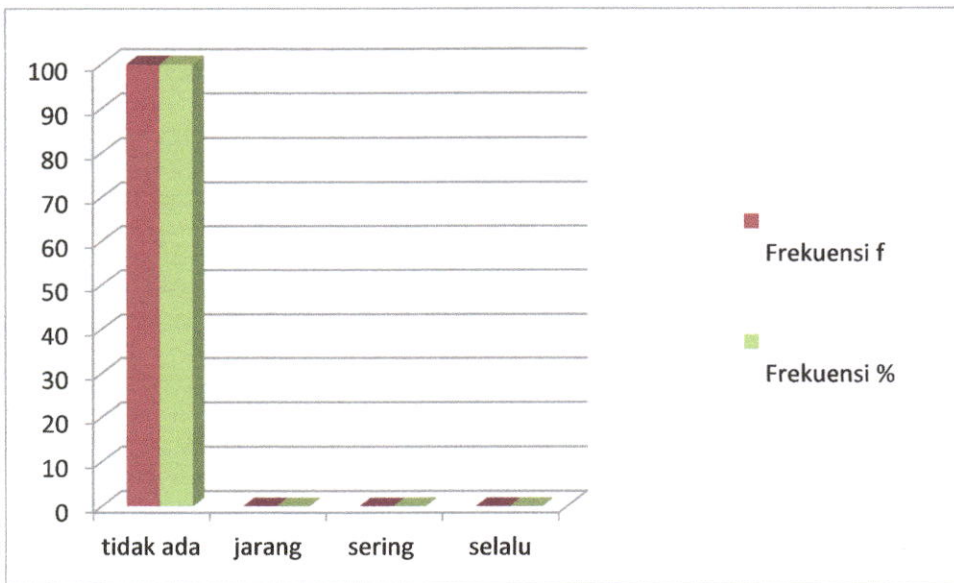
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang, yang keseluruhannya menilai petugas melayani sesuai prosedur yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak ada	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

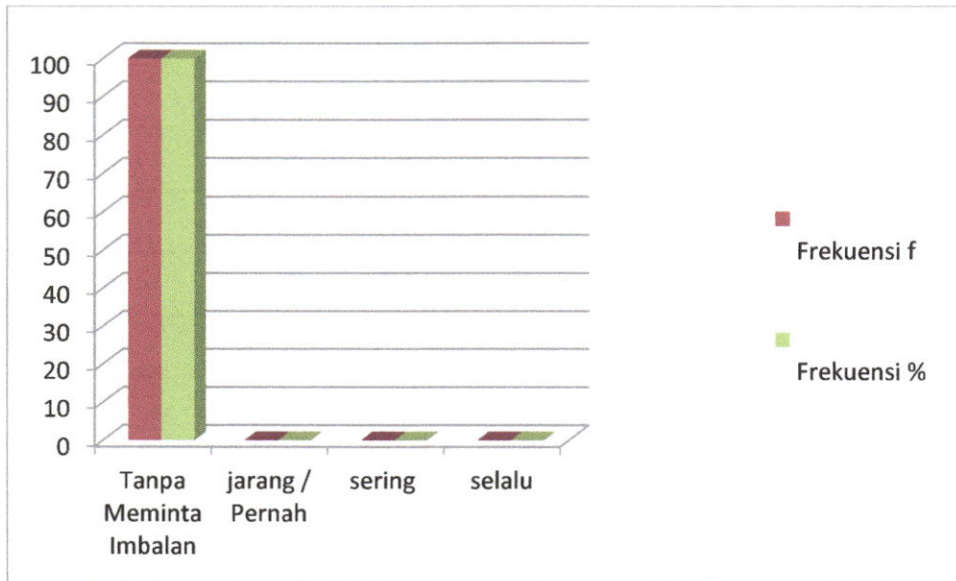
Dari Skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa menyalahgunakan jabatan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10.

Indeks Indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tanpa Meminta Imbalan	4	100	100
2	Jarang / Pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3. Indikator Menjual Pengaruh

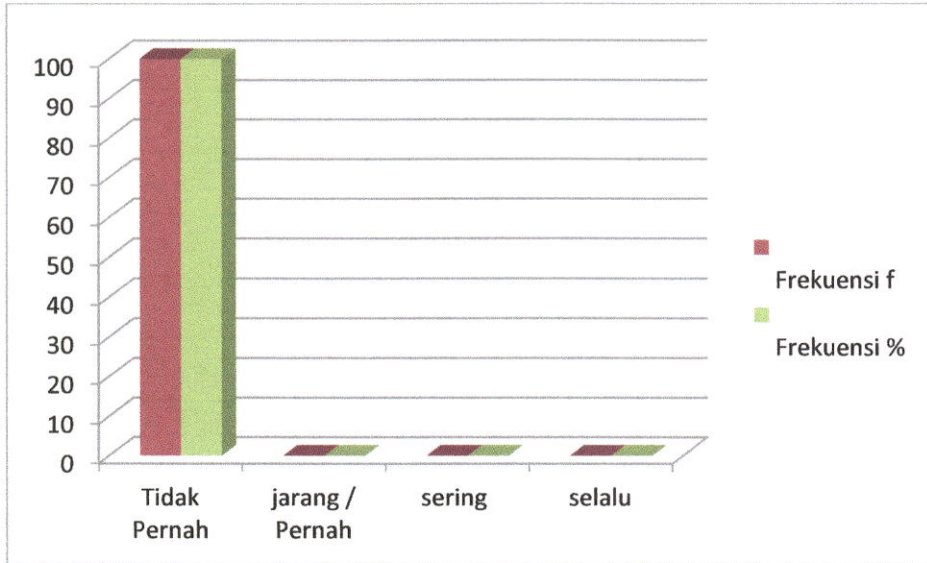
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang, yang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan tanpa menjual pengaruh. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	Tidak Pernah	4	100	100
2	jarang / Pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang keseluruhannya menilai petugas. Transparan dalam menjelaskan biaya perkara. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun transparan dalam hal tarif dan biaya.

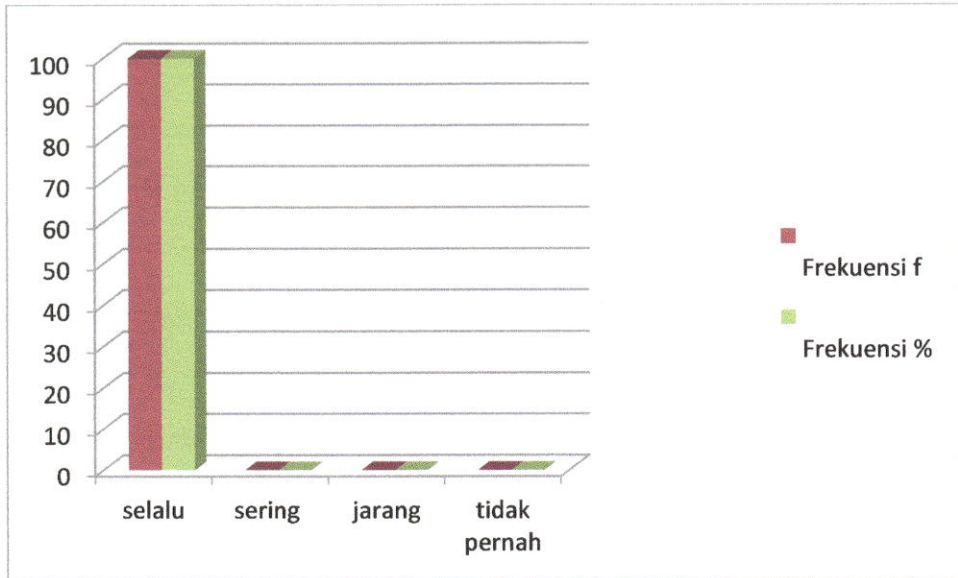
Tabel 12.

Indeks pada indikator transparansi biaya

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	100	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis

berikut ini.



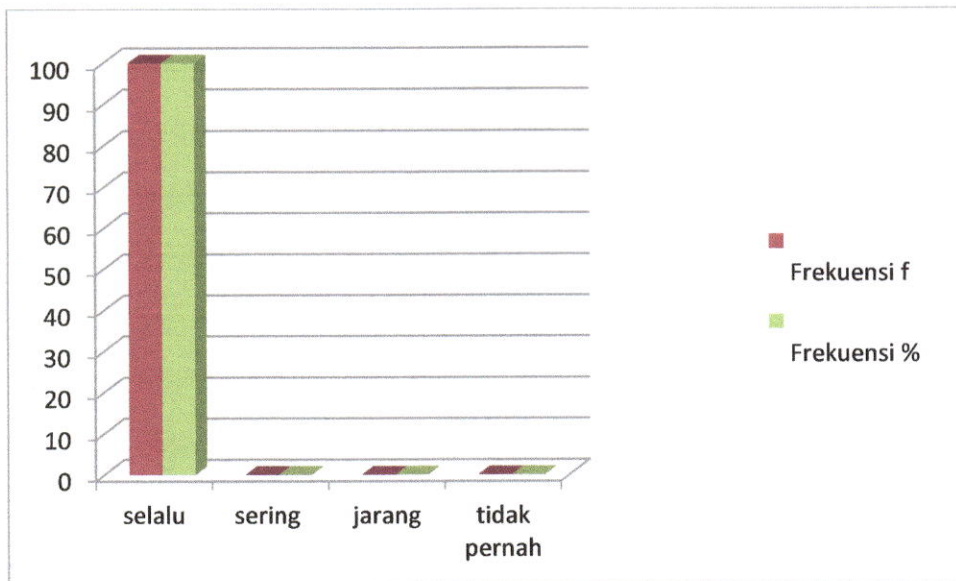
5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang keseluruhannya menilai petugas dalam melayani tanpa meminta biaya tambahan yang sifatnya tidak resmi. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih dari biaya tambahan/pungli.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	selalu	4	100	100
2	sering	3	0	0
3	jarang	2	0	0
4	tidak pernah	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



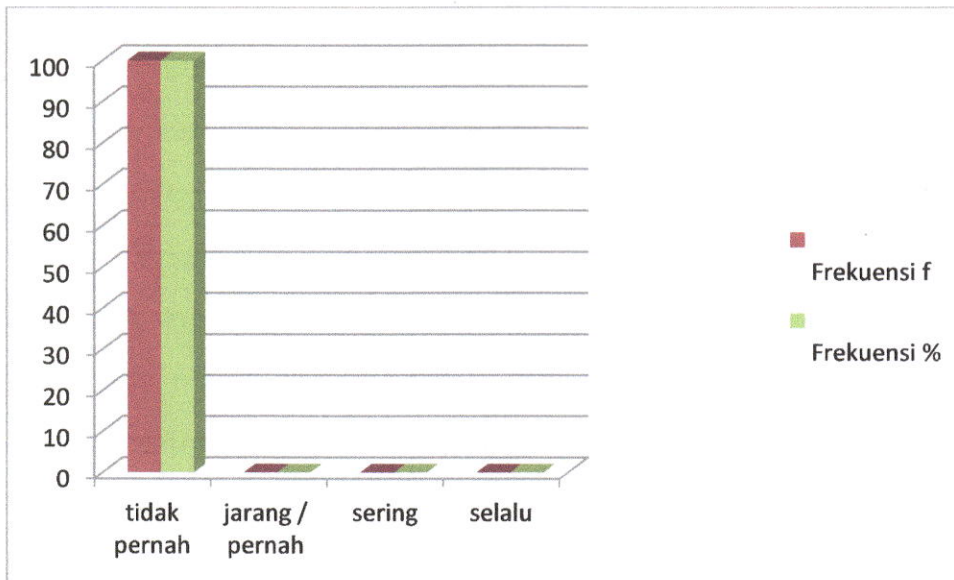
6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani tanpa meminta hadiah. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bersih karena tidak menerima hadiah yang tidak sah.

Tabel 14.
Indeks pada indikator Hadiah

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang / pernah	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



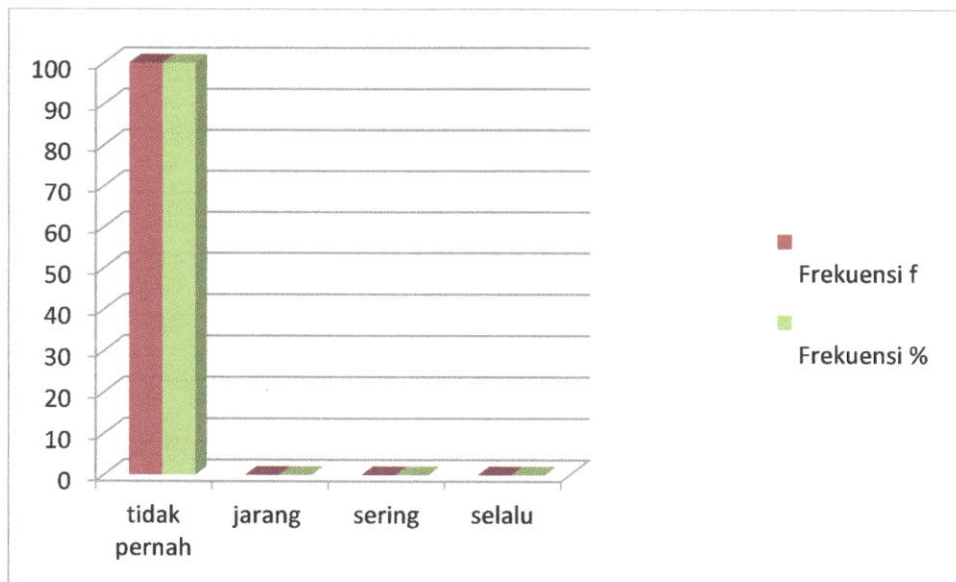
7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang keseluruhannya menilai petugas melayani pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selalu memberikan bukti pembayaran yang sah.

Tabel 15.
Indeks pada indikator Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



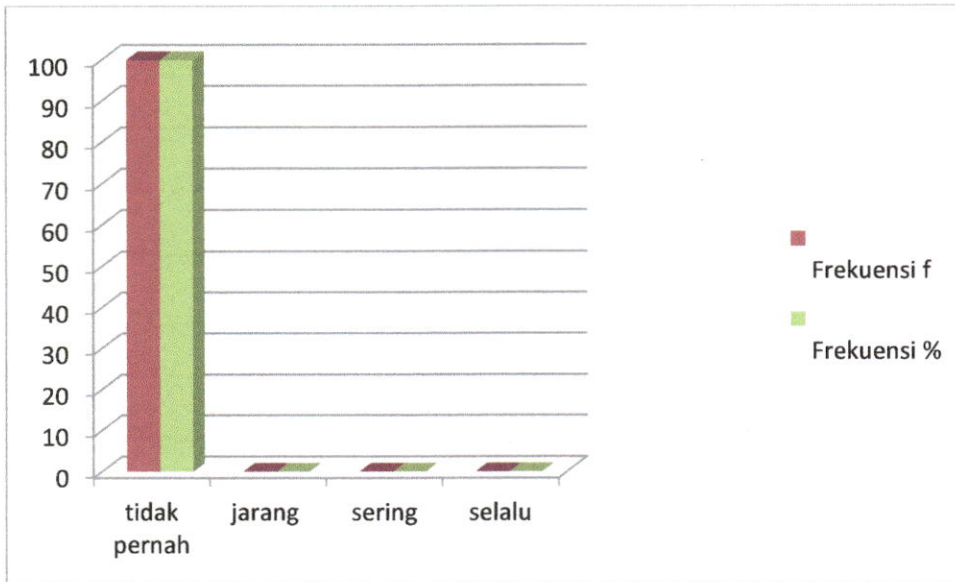
8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada praktek percaloan. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun transparan dan bersih dari praktik percaloan.

Tabel 16.
Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



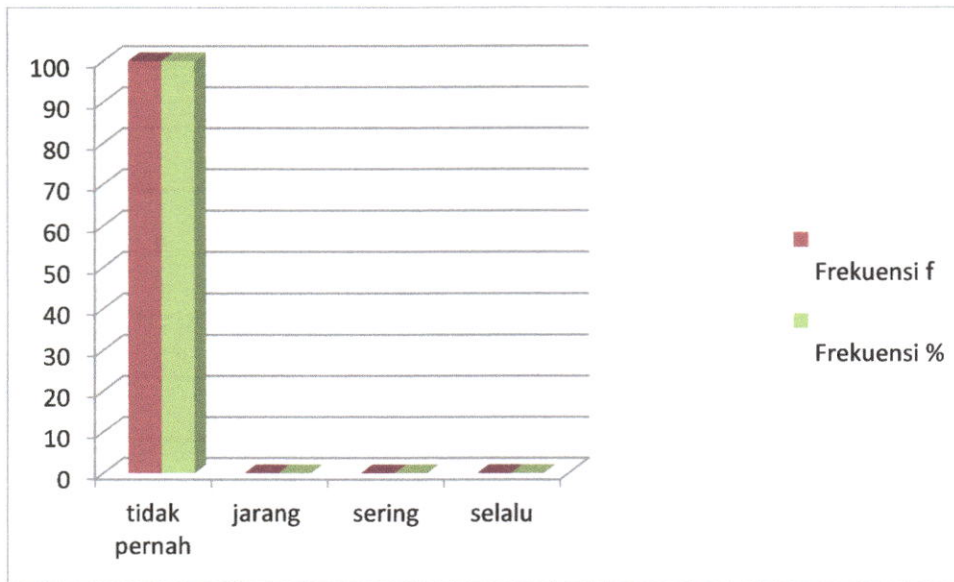
9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Perbuatan curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang yang kesemuanya menilai tidak ada perbuatan curang. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak terdapat perbuatan curang kearah KKN.

Tabel 17.
Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



10. Indikator Transaksi Rahasia

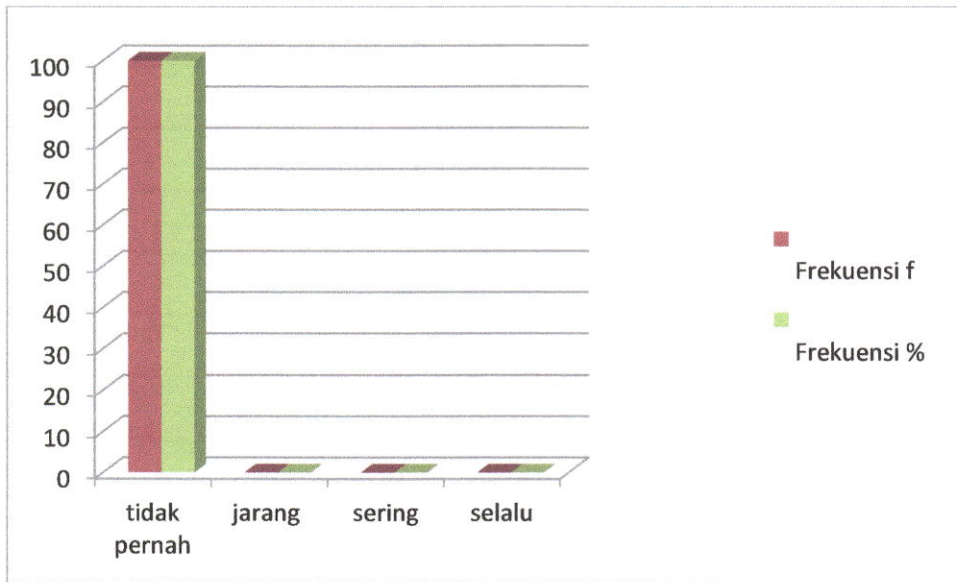
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00 dengan jumlah Responden sebanyak 45 Orang menilai bahwa pelayanan tanpa adanya transaksi rahasia. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bersih dari praktik pengurusan perkara.

Tabel 18.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	skor	Frekuensi	
			f	%
1	tidak pernah	4	100	100
2	jarang	3	0	0
3	sering	2	0	0
4	selalu	1	0	0
jumlah			100	100%

Berdasarkan tabel di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



C. INDEKS PERSEPSI KORUPSI SATUAN KERJA PADA PENGADILAN

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebesar **4,00**. Indeks tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **100 %**.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan
Satuan Kerja pada pengadilan**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Tetap Meningkatkan Pelayanan untuk masyarakat
2	Agar lebih ditingkatkan 3S dan 5R
3	Tetap tingkatkan kebersihan
4	Ruang tunggu sidang dan PTSP agar lebih nyaman
5	Tingkatkan pelayanan administrasinya

Data Responden

	Nama/Kode Responden	Domisili	Umur/JK	Pendidikan/Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Waktu Rekam
1	Sutejo, S.H., M.H R-099134-IPAK-OB4A30B8D1	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21-Mar-24
2	Luqmanul Hakim R-099134-IPAK-01CE869AB3	KALIMANTAN TENGAH	26 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26-Mar-24
3	Viona Maulida R-099134-IPAK-59F33A0153	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	21-Mar-24
4	Edy Ahmad Nurkojin, SH R-099134-IPAK-E853F45583	KALIMANTAN TENGAH	45 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20-Mar-24
5	M. Ainul Syahputra R-099134-IPAK-4E241E01B6 No. HP 82298560772	KALIMANTAN TENGAH	27 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15-Mar-24
6	Tri Hartati R-099134-IPAK-7F17A31287	KALIMANTAN TENGAH	45 Tahun Perempuan	SMULAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	08-Mar-24
7	Andri Sutrisno, S.H R-099134-IPAK-1173D0AFD6	KALIMANTAN TENGAH	45 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	07-Mar-24

8	Mila Mancasari R-099134-IPAK- 37E2BD90ED	KALIMANTAN TENGAH	25 Tahun Peremp uan	SMULAI NNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	07-Mar- 24
9	Putr R-099134-IPAK- A4471C73C3	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Peremp uan	Diploma 3LAINN YA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	06-Mar- 24
10	Jefri Era Pranata R-099134-IPAK- E995569556	KALIMANTAN TENGAH	40 Tahun Laki-laki	S2LAIN NYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	06-Mar- 24
11	Cristian Nibel R-099134-IPAK- 0B8CB4ED44	KALIMANTAN TENGAH	33 Tahun Laki-laki	S1LAIN NYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	05-Mar- 24
12	Herlin R-099134-IPAK- 5E18D394FA	KALIMANTAN TENGAH	25 Tahun Peremp uan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29-Feb- 24
13	Masrun R-099134-IPAK- 082153758585	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	SITENA GA KONTRA K	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	29-Feb- 24
14	Rahmadi Hutagalung R-099134-IPAK- 506FC436B9	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	SMUPO LRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27-Feb- 24
15	Aulianti R-099134-IPAK- E8311AD920	KALIMANTAN TENGAH	35 Tahun Peremp uan	SMUSW ASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	27-Feb- 24
16	Muhammad Natsir R-099134-IPAK- 0D3728486A	KALIMANTAN TENGAH	32 Tahun Laki-laki	S1SWAS TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	26-Feb- 24
17	Desinta R-099134-IPAK- 923B883653E	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Peremp uan	SMUPO LRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	23-Feb- 24
18	Bagas Rizki Putra R-099134-IPAK- F42E1415BE	KALIMANTAN TENGAH	26 Tahun Laki-laki	SMUPO LRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22-Feb- 24
19	Nesia R-099134-IPAK- 444B22FE24	KALIMANTAN TENGAH	23 Tahun Peremp uan	SMUPO LRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22-Feb- 24
20	Apriannur Damayanto, S.H R-099134-IPAK- 8BD35A2CD4	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16-Feb- 24
21	Cristian Nibel R-099134-IPAK- F085FC0B16	KALIMANTAN TENGAH	34 Tahun Laki-laki	S1LAIN NYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	16-Feb- 24
22	Gusti R-099134-IPAK- FD3686224B	PAPUA BARAT	27 Tahun Laki-laki	SMULAI NNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15-Feb- 24
23	Sumbiah R-099134-IPAK- 3174AD6D90	KALIMANTAN TENGAH	45 Tahun Peremp uan	SMPLAI NNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15-Feb- 24

24	Fajar R-099134-IPAK- DC216ED831	KALIMANTAN TENGAH	23 Tahun Laki-laki	SMUPO LRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	13-Feb-24
25	Rasmidi R-099134-IPAK- E11FB48679	KALIMANTAN TENGAH	46 Tahun Laki-laki	SMUSW ASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12-Feb-24
26	Lie Song R-099134-IPAK- B679799E3B	KALIMANTAN TENGAH	60 Tahun Perempuan	SMUWI RAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12-Feb-24
27	Rahmat Hidayat R-099134-IPAK- 6A89C9A97C	KALIMANTAN TENGAH	26 Tahun Laki-laki	Diploma 3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	02-Feb-24
28	Alen Maskuri R-099134-IPAK- 1404651A6C	KALIMANTAN TENGAH	23 Tahun Laki-laki	SMUPO LRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	02-Feb-24
29	Muhammad Zein R-099134-IPAK- 507501D821	KALIMANTAN TENGAH	50 Tahun Laki-laki	SMUSW ASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	01-Feb-24
30	Supriyo R-099134-IPAK- 020CEE54A9 No. HP 85752280987	KALIMANTAN TENGAH	31 Tahun Laki-laki	SMUSW ASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	31-Jan-24
31	H. Akhlani Maskur, S.E R-099134-IPAK- CB190815FB	KALIMANTAN TENGAH	50 Tahun Laki-laki	S1SWAS TA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	19-Jan-24
32	Viona Maulida R-099134-IPAK- F55FF34E68	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Perempuan	SMULAI NNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18-Jan-24
33	Prabowo Pangestu, S.H R-099134-IPAK- 64CB5DE19B	KALIMANTAN TENGAH	29 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18-Jan-24
34	Cristian Nibel R-099134-IPAK- 5CD60831C0	KALIMANTAN TENGAH	33 Tahun Laki-laki	S1LAIN NYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	18-Jan-24
35	M. Fajarudin R-099134-IPAK- FA30712465 No. HP 82158192013	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	SMUPO LRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	15-Jan-24
36	Afriawanati R-099134-IPAK- C7E408429A	KALIMANTAN TENGAH	35 Tahun Perempuan	SMUSW ASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11-Jan-24
37	Maulana Bayu Fazhari, S.H R-099134-IPAK- 6341A7B180	KALIMANTAN TENGAH	28 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11-Jan-24
38	Edy Ahmad Nurkojin, SH R-099134-IPAK- 94453BA1E5	KALIMANTAN TENGAH	50 Tahun Laki-laki	S1LAIN NYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	11-Jan-24
39	Madu Marjuni R-099134-IPAK- F9E520C0C2	KALIMANTAN TENGAH	50 Tahun Laki-laki	SMUSW ASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	09-Jan-24

40	Madu Marjuni R-099134-IPAK- 6E9581D838	KALIMANTAN TENGAH	50 Tahun Laki-laki	SMUSW ASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	09-Jan-24
41	Andri R-099134-IPAK- 7A597599DB	KALIMANTAN TENGAH	41 Tahun Laki-laki	S1POLRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	09-Jan-24
42	Putri R-099134-IPAK- 2B0BF6E685	KALIMANTAN TENGAH	27 Tahun Perempuan	Diploma 3LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	08-Jan-24
43	Rahmadi Hutagalung R-099134-IPAK- C60D0F8535	KALIMANTAN TENGAH	30 Tahun Laki-laki	SMUPO LRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	08-Jan-24
44	Abdul Syukur R-099134-IPAK- 5E75304FEC	KALIMANTAN TENGAH	40 Tahun Laki-laki	SMUPO LRI	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	05-Jan-24
45	Wa Ode H R-099134-IPAK- 57955F6B06	KALIMANTAN TENGAH	36 Tahun Perempuan	Diploma 3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	02-Jan-24

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan

NRR : Nilai Rata-rata

IPAK : Indeks Persepsi Anti Korupsi

*) : Jumlah NRR IPAK Tertimbang

NRR Per RL : Jumlah nilai per unsur dibagi

Jumlah kuesioner yang terisi

IPAK : 4,00

Jumlah Responden 45

Bobot

Unsur Pertanyaan

Bobot NRR Tertimbang

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	2	3	4
1,00-1,75	25,00-43,75	1	Selalu
1.76-2.50	43.76-62.50	2	Sering
2,51-3,25	62,51-81,25	3	Jarang
3,26-4,00	81,26-100,00	4	Tidak Ada

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata	Rangking Terendah & Tertinggi
Q 1	Manipulasi Peraturan	4,000	
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	
Q 3	Menjual Pengaruh	4,000	
Q 4	Transaksi Biaya	4,000	
Q 5	Biaya Tambahan	4,000	
Q 6	Hadiah	4,000	
Q 7	Tranparansi Biaya	4,000	
Q 8	Percaloan	4,000	
Q 9	Perbuatan Curang	4,000	
Q 10	Transaksi Rahasia	4,000	
JUMLAH		40,000	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Korupsi dengan nilai 4,00 atau pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun yang digunakan untuk perangkungan ruang lingkup survey pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah berdasarkan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung.

Berdasarkan Data Yang Dirangkum Untuk Survei Triwulan I Tidak Ada Nilai Terendah, Dikarenakan Semua Responden Memberikan Nilai 4,00 Terhadap Semua Indikator Yang Ditanyakan Sehingga Dalam Survei Triwulan I Ini Memperoleh Hasil Sesuai Yang Diharapkan.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4.000.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.000.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.000.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4.000.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4.000.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.000.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4.000.
9. Indikator Pernustsn Curang, mendapat indeks 4.000.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.000.

B. Rekomendasi

Dikarenakan Semua Indikator Pertanyaan Mendapatkan Nilai 4.00, Maka Seluruh unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun perlu mempertahankan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang berkualitas kedepannya, karena tuntutan masyarakat pengguna layanan terhadap kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kedepannya adalah konsisten dalam pelayanan. Meskipun dalam survei periode Januari s/d Maret 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB memperoleh peningkatan penilaian dari masyarakat dengan nilai 4,00 atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Namun, hal tersebut tidak boleh menjadikan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berpuas diri, hal tersebut harus konsisten dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan demi perbaikan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Agar Pada Survei Triwulan II Tahun 2024 Mendapatkan Hasil Seperti Triwulan I Tahun 2024 Ini.

Akhir kata tidak ada rekomendasi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini dikarenakan 10 kategori survey PN Pangkalan Bun masih dalam kategori sangat baik. Namun ada beberapa poin yang disampaikan yaitu :

1. Agar pelayanan kepada masyarakat dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan Meskipun Pada Survei Triwulan I Semua Indikator Mendapatkan Nilai 4.00.
2. Hasil survei ini dapat menjadi bahan/data acuan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB Pangkalan Bun dalam mengambil kebijakan yang konstruktif kedepannya.

3. Survei ini hendaknya terus dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah Responden yang semakin banyak dari setiap periode survei, agar supaya data yang didapatkan menjadi lebih valid dan representative.



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Telepon : (0532) 21014 – 21179

Pangkalan Bun Kode Pos 7 4 1 1 1

Website: www.pn.pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

**SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Nomor : W16-U3/01/PB.01/I/2024**

Para Pengguna Pengadilan yang terhormat,

Pimpinan dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada para pengguna pengadilan sesuai dengan motto Pengadilan Negeri Pangkalan Bun “PRIMA” Profesional, Ramah, Informatif, Melayani, Akuntabel untuk mewujudkan institusi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Untuk mengetahui kondisi riil pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun saat ini terkait dengan hal di atas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadakan Survei Persepsi Korupsi dengan melibatkan para pengguna pengadilan sebagai Responden. Mohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr(i) para pengguna pengadilan berkenan mengisi kuesioner yang kami edarkan dengan sejujurnya dan apa adanya. Jawaban Bapak/ibu atas pertanyaan di dalam kuesioner ini hanya semata-mata untuk meningkatkan layanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Atas partisipasi Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan terimakasih.

Pangkalan Bun, 05 April 2024
Koordinator Survey


WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum.

Dasar Hukum:

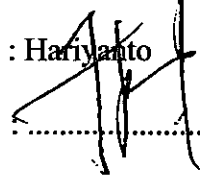
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi

PETUGAS PELAKSANA :

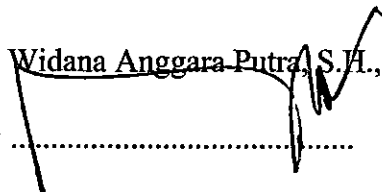
1. Petugas :

- Nama : Hiskia J Aritonang.
 Tanda Tangan : 
 Tanggal Pelaksana :

2. Pencacah/Penghitung hasil survei :

- Nama : Hariyanto
 Tanda Tangan : 
 Tanggal Pelaksana :

3. Pengawas/Pemeriksa :

- Nama : Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.
 Tanda Tangan : 
 Tanggal Pelaksana :



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201



**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB
TRIWULAN I**

Periode 1 Januari 2024 sampai 31 Maret 2024

<p>SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI NILAI INDEKS</p> <p>4,00 / 100%</p> <p>KATEGORI "SANGAT BAIK"</p>	<p>Jumlah : 45 Responden</p> <p>Jenis Kelamin :</p> <ul style="list-style-type: none">- Laki-laki 31- Perempuan 14
	<p>Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Tidak / Belum Sekolah : 0- SD : 0- SMP : 1- SMU : 22- D-1 : 0- D-2 : 0- D-3 : 4- S-1 : 16- S-2 : 2- S-3 : 0
	<p>Pekerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none">- PNS : 4- TNI : 0- POLRI : 14- SWASTA : 9- WIRAUSAHA : 1- TENAGA KONTRAK : 1- LAINNYA : 16

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Koordinator Tim Survei



WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.Hum..

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2023

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama :(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan :
3. Umur (Tahun) :
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan *)
5. Pendidikan terakhir :
 1. Tidak sekolah
 2. SD
 3. SMP/SLTP
 4. SLTA
 5. Diploma (D1/D2/D3/D4)
 6. Sarjana (S1)
 7. Pasca Sarjana (S2/S3)
5. Pekerjaan Utama :
 1. PNS
 2. TNI/Polri
 3. Pegawai Swasta
 4. Wiraswasta
 5. Petani/Nelayan
 6. Pedagang
 7. Pelajar / Mahasiswa
 8. Lainnya
6. Domisili/Tempat Tinggal :
7. Jenis Layanan yang Digunakan :

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondisi maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

Kuisisioner IPK :

No	Pertanyaan	Jawaban	Nilai
1.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	a. Tidak Sesuai Prosedur b. Jarang Sesuai Prosedur c. Sering Sesuai Prosedur d. Selalu Sesuai Prosedur	1 2 3 4
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	a. Petugas melayani selalu meminta imbalan b. Petugas melayani sering meminta imbalan c. Petugas melayani jarang meminta imbalan d. Petugas melayani tanpa meminta imbalan	1 2 3 4

3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
5.	Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	a. Tidak Pernah b. Jarang c. Sering d. Selalu	1 2 3 4
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
9.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Ada	1 2 3 4

Berdasarkan Survei Elektronik yang digunakan pada periode 01 Oktober 2023 s/d 30 Desember 2023

http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fak. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

NOTULA

- Dasar : Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Hari : Jumat
- Tanggal : 5 April 2024
- Pukul : 09.30 WIB
- Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
- Acara : Laporan Hasil Survei dan Tindak Lanjut 3 Terendah IKM dan IPAK Periode Januari 2024 – Maret 2024
- Peserta Rapat :
1. Seluruh Hakim
2. Sekretaris
3. Seluruh Panitera Muda
4. Seluruh Kepala Sub Bagian
5. Koordinator Tim Survei
6. Tim Suvei

Jalannya Rapat :

(Pengarahan umum pimpinan rapat)

Predikat yang diperoleh dari berbagai ruang lingkup penilaian survey IKM dan IPAK tersebut merupakan cerminan pelayanan yang telah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berikan kepada Masyarakat dan Instansi Pemerintahan Terkait. Merespon penilaian itu, terhadap tiga indikator dengan predikat tertinggi untuk selalu dijaga bahkan ditingkatkan sedangkan terkhusus untuk tiga indikator dengan predikat terendah agar

dilakukan koreksi walaupun sebenarnya predikat yang diberikan masih dalam kategori sangat baik;

(Laporan peserta, tanggapan, masukan dan lain-lain)

1. Perlu dilakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan dan Kesekretariatan maupun evaluasi terhadap kinerja pegawai secara berkala agar Produk Spesifikasi jenis pelayanan dapat dilakukan secepat mungkin;
2. Perlunya pemberian pemahaman kepada responden oleh petugas survei juga terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Kepuasan Masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan, Integritas, Profesionalisme dan Kapabilitas pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas I B

(Ketidaksesuaian)

NIHIL

(Rekomendasi atas ketidaksesuaian)

NIHIL

Nama Notulis,



Maria H. A. Moi Wato

NIP. 19981217 202203 2 010

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri

Pangkalan Bun,



I Gede Putu Saptawan

NIP. 19680909 199403 1 005



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	I Gede P. Saptawan	KPN	
2.	Erick I. Christoffel	Hakim	
3.	Widana A.P	Hakim	
4.	Wahyudi	Pm. Perdata	
5.	Masrianor	Pm. Pidana	
6.	Haryanto	Pm. Hukum	
7.	Hizkia A.	Staff Hukum	
8.	Maria H.	Staff Pidana	
9.	Ega A.	PTSP Hukum	



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

Jalan Sutan Syahrir Nomor 16 Pangkalan Bun, Kode Pos 74111 Telp. (0532) 21014
Fax. (0532) 21179 Website: www.pn-pangkalanbun.go.id e-Mail: pangkalanbunpn@gmail.com

DOKUMENTASI



